

IMPLEMENTASI PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006

TERHADAP LAPORAN KEUANGAN DAERAH

(Study Kasus Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur)



Oleh:

DIAN RATNA KUSUMA

NIM : 01112036

PRO PATRIA

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS

EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS

NAROTAMA SURABAYA

2016

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJIAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR TABEL	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR GAMBAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR LAMPIRAN	Error!
r! Bookmark not defined.	
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	
1.2 Perumusan Masalah	
1.3 Tujuan Penelitian	
1.4 Manfaat Penelitian	
1.5 Batasan Penelitian	
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	
2.2 Rerangka Teori	
2.2.1 Akuntansi Pemerintah	
2.2.1.1 Pengertian Sistem.....	
2.2.1.2 Pengertian dan Fungsi Pemerintah	
2.2.1.3 Pengertian Akuntansi Pemerintah	
2.2.1.4 Ruang Lingkup Akuntansi Pemerintah	
2.2.1.5 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Akuntansi Pemerintah	
2.2.1.6 Tujuan Akuntansi Pemerintah	
2.2.1.7 Karakteristik Akuntansi Pemerintah	
2.2.2 Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	
2.2.3 Kebijakan Umum Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah.	
2.2.3.1 Dasar Hukum	
2.2.3.2 Pemerintah Daerah.....	
2.2.3.3 Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah.....	
2.2.3.4 Kebijakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.....	

2.2.4	Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	
2.2.4.1	Sistem dan Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas....	
2.2.4.2	Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas..	
2.2.4.3	Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap / Barang Milik Daerah.....	
2.2.4.4	Sistem dan Prosedur Akuntansi Selain Kas	
2.3	Kerangka Berpikir	
BAB III : METODE PENELITIAN		
3.1	Metode Penelitian	
3.1.1	Jenis Penelitian	
3.1.2	Situasi Sosial	
3.2	Instrumen dan Metode Pengumpulan.....	
3.2.1	Instrumen Data	
3.2.2	Metode Pengumpulan Data	
3.3	Jenis Data	
3.4	Unit Analisis Data	
3.5	Teknik Pengolahan Data	
3.6	Teknik Analisis Data	
BAB IV : GAMBARAN UMUM DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR		
4.1	Sejarah Singkat Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur	
4.2	Struktur Organisasi	
4.3	Sistem Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas	
4.3.1	Sistem Penerimaan Kas	
4.3.2	Sistem Pengeluaran Kas	
4.4	Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur	
4.5	Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan Daerah	
4.6	Laporan Keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur	
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN		
5.1	Kesimpulan	
5.2	Saran	

DAFTAR PUSTAKA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

TELAH DIUJI DAN DIPERTAHANKAN PADA SELASA, 09 AGUSTUS 2016
DI UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

Judul Skripsi :

“Implementasi Permendagri 13 Tahun 2006 Terhadap Laporan Keuangan Daerah (Study Kasus Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur)”

Disusun oleh : Dian Ratna Kusuma
NIM : 01112036
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Perguruan Tinggi : Universitas Narotama Surabaya

Dihadapan tim penguji :

1. Prof. Dr. Soebandi, SE.,AK.,CA.,CPA
2. Dr. Agus Dwi Sasono, SE.,Ak.,M.Si
3. Rony Wardhana, SE., Ak., M.Ak.,CPAI



Subdal

Abstrak

Implementasi Permendagri 13 Tahun 2006 Terhadap Laporan Keuangan Daerah (Study Kasus Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur)

Oleh : Dian Ratna Kusuma

Instansi pemerintah merupakan salah satu bentuk organisasi non profit yang bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum yang berupa peningkatan keamanan, peningkatan mutu pendidikan atau peningkatan mutu kesehatan dan lain-lain. Apabila dibandingkan dengan instansi lain, instansi pemerintah memiliki karakteristik tersendiri yang lebih terkesan sebagai lembaga politik daripada lembaga ekonomi.

Instansi pemerintah juga berusaha untuk mencegah atau menghindari pemborosan dan hal – hal lain yang dianggap merugikan karena hal-hal demikian akan membawa pengaruh buruk bagi keuangan masing-masing instansi pemerintah. Untuk menjamin adanya efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan ini, maka diperlukan suatu sistem akuntansi keuangan yang tepat dan benar – benar diterapkan dalam instansi tersebut. Atas besaran dana yang digunakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umum maka melalui penelitian ini ingin mengetahui dan memahami apakah dalam penggunaan uang negara instansi pemerintah membuat laporan keuangan yang patuh terhadap UU dan peraturan, transparan dan akuntabel atas semua transaksinya kepada publik karena semuanya merupakan syarat utama untuk dapat menciptakan *good governance* di negara demokrasi yang kita cintai ini.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif analitis triangulasi untuk mengumpulkan data, menganalisa data dan melakukan *in-depth interview* dalam situasi sosial di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

Dalam penelitian ini masih ditemukan bahwa instansi pemerintah belum sepenuhnya patuh, transparan dan akuntabel pada peraturan yang ada karena belum dilaksanakannya peraturan yang ada secara menyeluruh, konsisten. Oleh karena itu perlu melakukan perbaikan secara menyeluruh terhadap instansi pemerintah agar tercapai *good governance*.

Kata Kunci : instansi pemerintah, transparan, akuntabel dan *good governance*.

Abstract
Implementation Permendagri 13 2006 on the Financial Statements
of Local Government

(Case Study in Social Services of The Province of East Java)

By : Dian Ratna Kusuma

Government agencies is one form of a non profit organization that aims to improve services to the public in the form of security enhancements improving the quality of education or improving the quality of healthcare and others. When compared with other agencies, government agency has its own characteristics that were more than impressed as a political institution rather than economic institutions.

Government agencies are also trying to prevent or avoid waste and other things that are considered harmful because it would thus be a negative influence for each financial government agencies. To ensure efficiency and effectiveness in financial management, we need a proper accounting system and truly can be applied in the institution. On the amount of fund used in providing services to the general public then through this study wanted to know and understand whether the use of state funds government agencies to prepare financial statements that adhere to laws and regulations, transparent dan accountable to all transactions to the public as these are the main requirements to be able to establish good governance in a democratic country that we love.

This research uses qualitative analytical triangulation methods to collect data, analyze data and conduct in depth interviews in a social situation in the social services of the province east java.

In this study still found that government agencies have not fully compliant, transparent and accountable to the existing legislation because it has not implemented existing legislation thoroughly, consistenly, therefore it needs to make improvements on the overall government agencies in order to achieve good governance.

Key words: government agencies, transparent, accountable and good governance.

KESIMPULAN

1. Pada dasarnya sistem pencatatan transaksi pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur telah dilaksanakan, tetapi belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 karena masih ada beberapa tahapan-tahapan dari siklus akuntansi yang belum dilakukan.
2. Sistem penerimaan dan pengeluaran kas pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur belum melakukan pemisahan pencatatan antara sistem penerimaan kas dan pengeluaran kas.
3. Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur masih menggunakan basis kas yaitu bahwa pengakuan/pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas, apabila transaksi belum mengakibatkan perubahan pada kas berarti transaksi tersebut belum dicatat dan pada akhir tahun tidak membuat jurnal penyesuaian .

DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, Zaki, 2010, Sistem Akuntansi, Penerbit BPFE, Yogyakarta,
- Bastian, Indra, 2010, Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, Penerbit BPFE, Yogyakarta
- Ghazali, Imam dan Sabeni, Arifin , 2008, Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintahan, Edisi 2, Yogyakarta
- Harahap, Sofyan Syafri, 2008, Teori Akuntansi, , Penerbit PT. Raja Grafindo Persada
- Kusnadi, 2012, Akuntansi Pemerintahan (Publik), Universitas Brawijaya, Malang
- Mulyadi, 2010, Sistem Akuntansi, Edisi Empat, Penerbit STIE YKPN, Yogyakarta
- Mardiasmo, 2012, Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Masmudi, 2009, Laporan Keuangan Sektor Publik, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik, BPK, Yogyakarta
- Narko, Sistem Akuntansi, 2007, Penerbit Yayasan Pustaka Nusantara, Yogyakarta
- Sabeni, Arifm, 2008, Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintahan, Edisi 4, Penerbit BPFE, Yogyakarta,
- Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan, Tentang Penyajian Laporan Keuangan 2004, Penerbit Salemba Empat
- Tanjung, Hafiz, Abdul, 2007, Akuntansi Pemerintahan Daerah, Bandung
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah